

TELAH RASIO DESIDENDI PEMIDANAAN PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1145 PID.SUS/2022/PN LBP)

Muhammad Syafiq Azhar^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: muhammad.syafiq@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus narkotika, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1145/Pid.Sus/2022/PNLbp. Artikel ini mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang bersalah. Teknik analisis yang digunakan menggunakan metode normatif yang bersifat preskriptif, memfokuskan pada bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder termasuk literatur hukum terkait. Teknik analisis yang diterapkan adalah pendekatan deduktif silogisme, yang menerapkan prinsip-prinsip hukum umum pada kasus spesifik. Hasil artikel menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mematuhi Pasal 183 KUHAP dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan bukti sah dan keyakinan yang diperoleh dari proses pembuktian di persidangan. Namun, ditemukan adanya ruang untuk interpretasi lebih lanjut mengenai keseimbangan antara syarat pembuktian dan perlindungan hak terdakwa, khususnya dalam mewujudkan peradilan yang adil.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Narkotika; Putusan

Abstract: This article aims to analyze the considerations of judges in imposing criminal sentences in narcotics cases, focusing on a case study of the Lubuk Pakam District Court Decision No.1145/Pid.Sus/2022/PNLbp. The article evaluates whether the decision aligns with Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), which requires that a judge can only impose a sentence if there are at least two pieces of valid evidence and a conviction that the crime was indeed committed by the defendant. The analytical technique used is the normative method with a prescriptive approach, focusing on primary legal materials such as laws and court decisions, as well as secondary legal materials, including relevant legal literature. The applied analysis technique is a deductive approach, which applies general legal principles to specific cases. The article's findings indicate that the judges at the Lubuk Pakam District Court have complied with Article 183 of the KUHP in issuing their decisions, based on valid evidence and the conviction obtained through the court's proof process. However, the study also finds room for further interpretation regarding the balance between meeting proof requirements and protecting the defendant's rights, particularly in achieving a fair trial.

Keywords: Judges' Considerations; Narcotics; Verdict

1. Pendahuluan

Narkotika merupakan masalah krusial yang terus mengancam kehidupan masyarakat di Indonesia. Narkotika disebut obat anestesi karena penggunaannya

menyebabkan hilangnya kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan¹. Selain efeknya yang berbahaya bagi kesehatan, Penyalahgunaan narkoba juga dapat memunculkan kejahatan baru, seperti mencuri, merampok dan berbagai tindak kekerasan maupun seks bebas². Jenis narkoba seperti shabu telah menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya yang sangat merusak, baik terhadap kesehatan fisik maupun mental pengguna, serta stabilitas sosial-ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah telah memberlakukan berbagai kebijakan dan hukum untuk mengatasi masalah ini, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun demikian, penegakan hukum dan upaya rehabilitasi sering kali belum berjalan seefektif yang diharapkan. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dan peredaran ilegal yang melibatkan jaringan kriminal terorganisir.

Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kasus narkoba adalah memastikan bahwa sistem peradilan mampu memberikan hukuman yang tepat dan adil. Hal ini mencakup bagaimana hakim dalam pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor ketika menjatuhkan putusan, terutama dalam kasus yang melibatkan penggunaan shabu. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangatlah penting, karena selain memberikan hukuman sebagai efek jera, putusan tersebut juga harus mempertimbangkan upaya rehabilitasi bagi pelaku untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa mendatang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perkara narkoba, khususnya dalam kasus shabu, dan untuk menentukan apakah pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi sistem peradilan di Indonesia dalam menangani kasus-kasus narkoba di masa depan.

Identifikasi masalah ini sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem peradilan dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Dengan analisis yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya akan mengungkap masalah-masalah yang ada, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat memperbaiki kebijakan hukum terkait penanganan kasus narkoba di Indonesia.

¹ Qomariyatus Sholihah, "Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA" Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 9 No. 1. (2013): 155

² Nur Aini, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 140/Pid.Sus/2015/PN.MGG)," Verstek 6, no. 3 (2015): 202–13.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya³. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang perlu adalah preskriptif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif dengan berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik simpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Rasio Decidendi Pemidanaan Perkara Narkotika dalam Putusan No.1145/Pid.Sus/2022/PNLbp dengan Ketentuan Pasal 183 KUHP

Dalam putusan pidana, termasuk perkara narkotika seperti kasus Nata Rahmat, rasio decidendi merupakan alasan yuridis yang mendasari putusan hakim. Rasio decidendi mencerminkan logika hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.

Rasio decidendi dalam kasus ini terletak pada penerapan Pasal 183 KUHP, yang mengharuskan hakim untuk yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini, alat bukti berupa narkotika yang ditemukan dan keterangan saksi dari pihak kepolisian menjadi dasar kuat bagi hakim untuk membangun keyakinan bahwa tindak pidana narkotika benar-benar dilakukan oleh terdakwa.

Selain itu, rasio decidendi juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara bukti fisik dan keterangan saksi. Hakim tidak hanya mempertimbangkan keberadaan barang bukti narkotika, tetapi juga relevansi dan konsistensi keterangan saksi yang memberikan konteks dan memperkuat hubungan antara barang bukti dan terdakwa. Keseimbangan ini merupakan inti dari rasio decidendi dalam putusan ini, yang memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap semua alat bukti yang ada.

Penjatuhan Putusan oleh Hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis dengan mengingat ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah⁴.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 5.

⁴ Arwendra Tri, "Peninjauan Kembali Terpidana Berdasarkan Kekhilafan dan Kekeliuran Hakim *Judex Facti* dalam Mengadili Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/PID.SUS/2016)," *verstek* 8, no. 1, (2020): 27

Pengakuan terdakwa, meskipun penting, tidak dijadikan satu-satunya dasar putusan, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP. Rasio decidendi dalam kasus ini juga mencakup penerapan prinsip *in dubio pro reo*, yang mengharuskan hakim untuk memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian. Namun, dengan adanya bukti yang cukup kuat dan relevan, hakim dalam kasus ini dapat menyimpulkan dengan keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Dengan demikian, rasio decidendi dalam putusan ini bukan hanya mencerminkan penerapan formal dari ketentuan Pasal 183 KUHP, tetapi juga mencakup penilaian terhadap keadilan materiil yang didasarkan pada semua fakta dan bukti yang dihadirkan di persidangan. Ini menunjukkan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada bukti yang ada, tetapi juga pada pertimbangan hukum yang mendalam dan konsisten.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa putusan dalam kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan terdakwa Nata Rahmat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana setelah memastikan adanya minimal dua alat bukti yang sah, yaitu barang bukti narkoba dan keterangan saksi dari pihak kepolisian. Kedua alat bukti ini saling mendukung dan memperkuat keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah pelakunya. Rasio decidendi dalam putusan ini berfokus pada penerapan prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif, di mana pengakuan terdakwa diperhatikan namun tidak menjadi dasar utama tanpa dukungan bukti lain, sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) KUHP. Selain itu, asas *in dubio pro reo* juga diterapkan, yang mengharuskan putusan yang menguntungkan terdakwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian. Namun, dalam kasus ini, hakim berhasil membangun keyakinan yang kuat berdasarkan penilaian cermat terhadap seluruh alat bukti yang ada. Dengan demikian, proses pembuktian dan rasio decidendi yang melandasi putusan ini mencerminkan upaya untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum secara seimbang dan proporsional.

References

- Achmad Ali. (1999). *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Adami Chazawi. (2007). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Aloysius Wisnubroto. (1997). *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Aini, Nur. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 140/Pid.Sus/2015/PN.MGG)." *Verstek* 6, no. 3 (2015): 202–13
- Bambang Waluyo. (1992). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dharana Lastarya. (2006). *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Jakarta: Pakarkarya.

- Dominico Sony Nugraha. 2024. Kajian Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika Terhadap Dakwaan Alternatif Penuntut Umum (Studi Putusan Nomor 890Pid.Sus2023PN.SB). Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Erwin Mappaseng. (2002). Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya. Surabaya: Buana Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014
- Muhammad Aditya Nugroho. 2022. Tinjauan Kedudukan Kesaksian yang Diberikan oleh Anggota Polri dalam Pembuktian Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL). Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Muhammad Aditya Nugroho. 2022. Tinjauan Kedudukan Kesaksian yang Diberikan oleh Anggota Polri dalam Pembuktian Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL). Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Qomariyatus Sholihah. 2013. Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol. 9 No. 1, hlm. 153-159
- Tri, Arwendra dan Sri Wahyuningsih Yulianti. "Peninjauan Kembali Terpidana Berdasarkan Kekhilafan dan Kekeliuran Hakim Judex Facti dalam Mengadili Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/PID.SUS/2016)." *Verstek* 8, no. 1. (2020): 27
- Wardi. 2021 Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja. Skripsi. Makassar. Universitas Hasanuddin